The Raising Star Bakal Jatuh?

Kemungkinan Prabowo hanya mendapat sanksi administratif. Ia bisa dipecat, dikaryakan, atau tak mendapat jabatan.



KEKHAWATIRAN banyak orang bahwa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) akan bekerja setengah hati ternyata tak beralasan. Meski dewan yang dibentuk 3 Agustus 1998 untuk memeriksa para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam kasus penculikan para aktivis itu diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Soebagyo yang pernah jadi ajudan mantan Presiden Soeharto, mereka berani mengeluarkan rekomendasi yang cukup keras terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus yang juga menantu Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Tampaknya, situasi reformasi saat ini tak memungkinkan DKP untuk mengeluarkan keputusan yang "lembek".

Jumat pekan lampau, 14 Agustus, setelah dua kali memeriksa Prabowo, DKP yang beranggotakan enam orang perwira bintang tiga itu memberikan rekomendasi pada Panglima ABRI (Pangab) menyangkut nasib putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang sudah dibebastugaskan sebagai Komandan Sekolah Komando itu. Prabowo bersama mantan Danjen Kopassus Mayjen Muchdi P.R. dan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan disarankan untuk diberikan sanksi administratif atau dibawa ke mahkamah militer.

Dengan rekomendasi seperti itu berarti karir militer Prabowo yang melejit dengan cepat ini otomatis akan terhenti atau minimal tersendat. Nyala "*the raising star*", julukan yang diberikan untuknya, bakal padam. Bila sanksi administratif yang dijatuhkan, ada beberapa kemungkinan menunggunya: dipecat, ditugaskaryakan di instansi pemerintah, atau bisa terus berdinas tapi tidak memiliki jabatan di lingkungan ABRI. Tiga situasi yang jelas tak bakal disukai oleh perwira yang cemerlang tersebut.

Tapi, rekomendasi itu bukanlah penentu akhir nasib Prabowo karena Pangab-lah yang akan memutuskan menerima atau menolak rekomendasi tersebut. Namun, melihat sikap Pangab dan situasi yang berkembang saat ini, agak sulit bagi Jenderal Wiranto untuk menolak rekomendasi seperti itu. Pilihannya hanya tinggal apakah memberi sanksi administratif atau membawa para perwira pasukan elite TNI-AD itu ke mahkamah militer.



SOEBAGYO BERSAMA PRABOWO. Siapa yang memberi perintah?

BOLO KESUMA

Inisiatif Sendiri?

Kemungkinan besar pilihan pertamalah yang diambil oleh mantan ajudan Presiden Soeharto itu. Pilihan itu pula yang dipakai oleh Dewan Kehormatan Militer yang dibentuk untuk menyelidiki keterlibatan para perwira dalam kasus penembakan di Kuburan Santa Cruz, Dili, November 1991. Dengan putusan tersebut, dua petinggi ABRI terpental, yaitu Pangdam Udayana Mayjen Sintong Panjaitan dan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen Warouw. Mereka dicopot dari jabatannya dan kasus ini dianggap selesai. Masyarakat tak pernah tahu apa yang diperdebatkan dalam rapat-rapat dewan yang selalu tertutup dan apa sebenarnya kesalahan dua perwira itu.

Jatuhnya pilihan tersebut karena kelihatannya itulah yang paling aman. Kebobrokan ABRI yang tercermin dalam soal prosedur, disiplin, kejujuran, atau tabiat keperwiraan—hal-hal yang diperiksa dalam kasus itu—tak bakal terungkap. Ketidakjelasan inilah yang ditakuti banyak pihak bakal terjadi. Padahal seharusnya, kata Letjen (purnawirawan) Hasnan Habib, kadar kesalahan perwira inilah yang penting. Kalau jelas bahwa kesalahan itu cenderung ke pidana, ya, langsung saja dibawa ke mahkamah militer.

Di mahkamah militer yang terbuka untuk umum itulah bakal jelas soal-soal yang hingga kini masih gelap dalam kasus penculikan aktivis tersebut. Soal bawah kendali operasi (BKO), misalnya. BKO, menurut definisinya, terjadi jika ada satu kesatuan mendapat tugas tertentu, misalnya komando daerah militer, kadang minta kekuatan pasukan dari kesatuan lain. Dalam hal ini Kopassus. Nah, pasukan Kopassus inilah yang dinamakan BKO.

Ternyata, dalam pemeriksaan, Prabowo tampak ingin menanggung seluruh kesalahan penculikan itu di pundaknya sendiri. "Prabowo mengaku salah dalam menganalisis perintah BKO dan ia bersedia bertanggung jawab," kata Ketua DKP Jenderal Soebagyo. Namun, hingga kini belum terjawab, siapa yang memberi perintah dan apa isi perintah tersebut. Satu-satunya jawaban Soebagyo hanyalah bahwa perintah itu bukan dari Panglima Tertinggi Jenderal Besar Soeharto atau Pangab Jenderal Feisal Tanjung.

Tak jelas mengapa bapak seorang anak ini menyimpan jawaban tersebut. Apakah karena jawaban tersebut merupakan bom waktu yang akan ia lempar di saat terakhir untuk menyeret banyak petinggi ABRI lain, atau memang tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Soalnya, menurut Wakil Ketua DPR/MPR Letjen Hari Sabarno, penugasan BKO ini bisa datang dari atasan, bisa juga atas analisis atau inisiatif sendiri. "Dalam penugasan tempur, banyak tugas BKO yang dikembangkan dari analisis sendiri dan tak perlu perintah dari atasan," kata Hari.

Sayangnya, masalah perintah BKO ini tak bakal terungkap bila Pangab memilih rekomendasi DKP yang pertama. Bila rekomendasi itu yang dipilih, *the raising star* ini mungkin tak perlu masuk penjara, tapi karirnya berhenti di usianya yang baru 47 tahun ini.

Laporan Tiarma Siboro